



# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Pekalongan Tahun 2024 tepat pada waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, penyusunan LKjIP bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan atas komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Renja dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas penerapan prinsip - prinsip *good governance* yaitu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah.

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan agar dapat memberikan kinerja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel baik dari aspek perencanaan,

organisasi, manajemen keuangan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024. Semoga ALLAH SWT terus melimpahkan karuniaNYA kepada kita semua. Aamiin.

Pekalongan, 26 Februari 2025

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM



**Drs. SUPRIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199201 1 010

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 85.60.  
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebesar 85,75 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,18%.
2. Indikator nilai ekspor perdagangan target yang ditetapkan 26,97 Juta USD.  
Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan diolah oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, bahwa untuk realisasi Tahun 2024 atas nilai ekspor perdagangan sebesar 14,50 Juta USD. Sehingga capaian untuk indikator nilai ekspor perdagangan sebesar 53,77%. Capaian Nilai Ekspor Perdagangan ini jauh dari target yang telah ditentukan disebabkan beberapa faktor yang memicu penurunan nilai ekspor.
3. Indikator nilai modal usaha UMKM dari Koperasi target yang ditetapkan Rp. 8,42 Triliyun.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Sistem ODS Koperasi, bahwa untuk realisasi Tahun 2024 atas nilai modal usaha UMKM dari Koperasi sebesar Rp. 10,33 Trilyun. Sehingga indikator nilai modal usaha UMKM dari Koperasi sebesar 122,71%.

Kinerja keuangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 18.161.865.384,00 atau 93,90% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 19.341.510.000,00.

Capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1    LATAR BELAKANG.....	1
1.2    GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	3
1.3    KONDISI APARATUR.....	7
1.4    ISU STRATEGIS .....	11
BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1    RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026 .....	14
2.2    INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026 ...	24
2.3    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	26
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
3.1    PENGUKURAN KINERJA .....	29
3.2    EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	
3.3    AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	33
3.4    PRESTASI YANG DIRAIH .....	58
3.5    INOVASI.....	60
BAB IV    PENUTUP .....	62
LAMPIRAN .....	64
Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 – 2026 .....	64
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan melakukan beberapa langkah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan dan koperasi UMKM berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 2 : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, Pasal 2 ayat (1) : Dindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ayat (2) : Dindagkop dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### **1.2.1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Bab III Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

#### **1.2.1.1. Tugas**

Dinas Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penanganan pasar sesuai dengan kebijakan Walikota.

**1.2.1.2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b) Perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perdagangan;
- d) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pasar dan pedagang kaki lima;
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- g) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (sop) dan/ atau standar pelayanan (sp) bidang tugasnya;
- h) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;

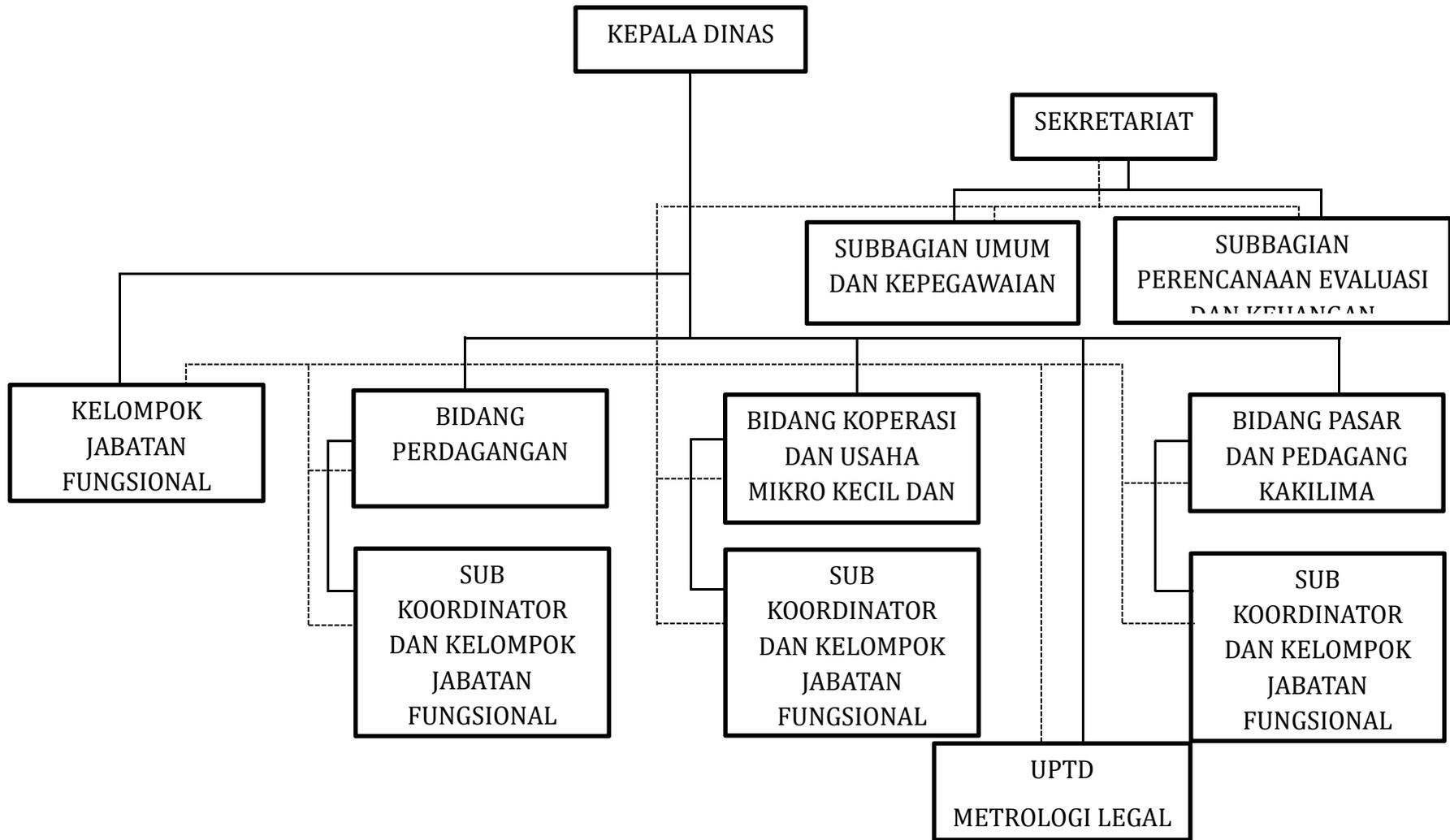
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1.2.1.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Struktur Organisasi Dindagkop UKM terdiri dari :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat
- c) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dan Keuangan; dan
- d) Subbagian Umum & Kepegawaian.
- e) Bidang Perdagangan;
- f) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g) Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima;
- h) UPTD Metrologi Legal;
- i) Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan



### 1.3 KONDISI APARATUR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan memiliki dukungan sumberdaya manusia. Jumlah pegawai/personil ASN Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 (Per 31 Desember 2024) berjumlah 59 Orang yang terdiri dari :

Tabel 1.1

Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Bidang/UPTD	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	1	-	5	3	1	1
2.	Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	-	3	1	1
3.	Perdagangan	-	-	1	-	3	2	-	1
4.	Pasar dan PK5	2	-	19	-	9	3	1	-
5.	UPTD Metrologi Legal	-	-	-	-	1	-	2	-
Jumlah		59							

Sumber : DUK Dindagkop UKM Kota Pekalongan, 2024

Tabel 1.2

Pegawai ASN di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan pendidikan Tahun 2024

No	Bidang/UPTD	SD		SMP		SMA/SMK		D4/S1		S2	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	1	-	1	1	3	3	1	-
2.	Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
3.	Perdagangan	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2
4.	Pasar dan PK5	6	-	8	-	15	2	2	1	-	-
5.	UPTD Metrologi Legal	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
Jumlah		6		9		20		17		7	

Sumber : DUK Dindagkop UKM Kota Pekalongan, 2024

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Pekalongan khususnya dan *stakeholder* terkait, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dilengkapi dan didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut:

a.	Mobil Dinas	:	4 unit
b.	Motor Dinas	:	25 unit
c.	Dump Truk	:	6 unit
d.	Kendaraan Roda Tiga lainnya	:	6 unit
e.	Container	:	2 Unit
f.	Gerobak	:	59 Unit
g.	Genset	:	2 Unit
h.	Pompa Air	:	8 Unit
i.	Mesin ketik	:	5 Unit
j.	Lemari Kas	:	1 Unit
k.	Lemari Besi	:	14 Unit
l.	Lemari Kayu	:	14 Unit
m.	Rak Besi	:	4 Unit
n.	Filling Cabinet Besi	:	20 Unit
o.	Brankas	:	1 Unit
p.	Lemari Kaca	:	27 Unit
q.	Lemari Makan	:	1 Unit
r.	CCTV	:	2 Unit
s.	Papan Visual	:	2 Unit
t.	White Board	:	1 Unit
u.	Mesin Presensi	:	16 Unit
v.	Display	:	3 Unit

w.	LCD	:	4	Unit
x.	Papan Nama Instansi	:	5	Unit
y.	Papan Pengumuman	:	3	Unit
z.	Papan Tulis	:	1	Unit
aa.	Alat Kantor Lainnya	:	17	Unit
ab.	Meja Kerja Kayu	:	4	Unit
ac.	Kursi Besi/Metal	:	13	Unit
ad.	Bangku Panjang Besi/Metal	:	56	Unit
ae.	Meja Rapat	:	19	Unit
af.	Meja Ketik	:	1	Unit
ag.	Meja Resepsionis	:	1	unit
ah.	Meja Makan Besi	:	68	unit
ai.	Kursi Rapat	:	180	unit
aj.	Kursi Tamu	:	2	unit
ak.	Meja Komputer	:	1	unit
al.	Sofa	:	2	unit
am.	Meja Tulis	:	4	unit
an.	Mesin Pemotong Rumput	:	2	unit
ao.	Lemari Es	:	2	unit
ap.	A.C Window	:	35	unit
aq.	A.C Split	:	4	unit
ar.	Kipas Angin	:	7	unit
as.	Kompor Gas	:	2	unit
at.	PC. Unit	:	41	unit
au.	Harddisk eksternal dan sejenisnya	:	10	unit

av.	Scanner	:	3	unit
aw.	Server	:	1	unit
ax.	Monitor	:	2	unit
ay.	Printer	:	51	unit
az.	Laptop/notebook	:	26	unit
ba.	TV	:	8	unit
bb.	Amplifier	:	1	unit
bc.	Wireless	:	6	unit
bd.	Sound System	:	4	unit
be.	Megaphone	:	4	unit
bf.	Microphone	:	5	unit
bg.	Camera	:	21	unit
bh.	Tangga Alumunium	:	1	unit
bi.	Dispenser	:	2	unit
bj.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	:	10	unit
bk.	Alat Pemadam	:	12	unit
bl.	Meja Kerja	:	42	unit
bm.	Meja Tamu	:	4	unit
bn.	Meja Rapat	:	6	unit
bo.	Kursi Kerja	:	29	unit
bp.	Lemari Buku Arsip	:	16	unit
bq.	Alat Komunikasi Radio/Telphone	:	5	unit
br.	Tenda	:	3	unit
bs.	Ruang Kerja	:	11	ruang
bt.	Ruang Rapat	:	2	ruang

- bu. Gudang : 1 ruang  
bv. Peralatan Tera : 365 buah

#### 1.4 ISU STRATEGIS

- 1) Kota Pekalongan memiliki 11 Pasar dan 1 Pusat Kuliner dan Fashion. Kondisi pasar di Kota Pekalongan belum semuanya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2021 Pasar Rakyat. Jumlah pasar yang sesuai dengan SNI hanya ada 1 pasar dari 11 pasar yaitu Pasar Podosugih yang berada Di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat. Hal tersebut, karena adanya kendala dalam sarana dan prasarana pasar yang masih belum maksimal, pengelolaan pasar yang masih belum optimal dan kebersihan pasar yang masih harus ditingkatkan lagi. Pembangunan kembali Pasar Banjarsari oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menjadi sebuah momentum yang sangat ditunggu oleh masyarakat Kota Pekalongan. Hal tersebut juga merupakan momentum penting dan tugas untuk Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan agar dapat mempersiapkan pengelolaan dan manajemen Pasar Banjarsari yang profesional, handal dan berkompeten.
- 2) Kota Pekalongan memiliki beberapa potensi dalam bidang perdagangan salah satunya adalah produk potensial ekspor berupa *material fabric*, tekstil, *craft* dan produk olahan ikan. Namun, potensi ini masih belum digali dengan maksimal sehingga ekspor yang ada di Kota Pekalongan masih belum mencapai target yang diharapkan. Beberapa kendala yang dihadapi adalah keterbatasan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses informasi mengenai ekspor diantaranya adalah komoditas produk unggulan yang menjadi *trend* pasar internasional, alur dan mekanisme dalam pelaksanaan ekspor, alur dan mekanisme pengurusan perizinan berusaha dalam proses ekspor, dan kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan bimbingan untuk dapat menggali potensi ekspor yang ada di Kota Pekalongan.

- 3) Potensi lain dalam bidang perdagangan adalah perkembangan usaha Toko Swalayan dan Pergudangan di Kota Pekalongan. Namun perkembangan usaha Toko Swalayan dan Pergudangan di Kota Pekalongan ini belum diikuti dengan pengetahuan dan kompetensi pemilik usaha Toko Swalayan dan Pergudangan mengenai regulasi tentang Perizinan yang berlaku. Sehingga berdampak pada berdirinya Toko Swalayan dan Gudang yang belum memiliki izin secara legal sesuai dengan ketentuan namun telah melakukan kegiatan operasional.
- 4) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dirasa masih belum ditegakkan secara maksimal. Hal tersebut salah satunya dikarenakan belum dilakukan sosialisasi kepada pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat dan pedagang tentang perlindungan konsumen dan metrologi legal. Kegiatan sosialisasi yang efektif dan masif diperlukan guna menarik pedagang dan pelaku usaha yang memiliki alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan tera atau tera ulang. Hal lain yang masih menjadi kendala adalah penegakan dan penerapan sanksi bagi pedagang yang memiliki alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) namun belum melaksanakan tera/tera ulang. Di sisi lain, kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sesuai dengan keahlian dan jenjangnya pada bidang tera menjadi salah satu penyebab belum optimalnya proses pelaksanaan tera tera ulang UTTP di Kota Pekalongan.
- 5) Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian BAB III Fungsi, Peran dan Prinsip Pasal 4 huruf (c) menjelaskan bahwa peran koperasi salah satunya adalah memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. Namun, koperasi sebagai salah satu penyangga perekonomian masih belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi, dimana masih banyak proses transaksi dan pengelolaan yang dilakukan secara manual. Banyaknya proses dan alur yang harus dilaksanakan dalam transaksi ini menjadikan masyarakat tidak berminat dan lebih memilih lembaga keuangan lain

yang lebih mudah dan efisien dalam melakukan transaksi. Minimnya penggunaan teknologi informasi dalam setiap proses transaksi keuangan di beberapa koperasi menyebabkan penurunan kinerja koperasi yang dianggap kurang akuntabel dan profesional dalam pengelolaan kinerja keuangan. Selain itu, beberapa koperasi mulai mengalami penurunan kinerja yang ditunjukkan dengan jumlah koperasi aktif yang turun tiap tahunnya. Diantaranya faktor internal seperti permasalahan dalam internal koperasi antar pengurus atau antar anggota menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sehingga menghambat kinerja koperasi. Kurangnya literasi, informasi dan pemahaman oleh pengurus koperasi dan jajaran manajemen koperasi terhadap beberapa regulasi perkoperasian yang ada, sehingga masih diperlukan banyak pelatihan dan pembinaan dalam meningkatkan kinerja koperasi agar dapat meningkatkan kualitas koperasi sehingga harapannya pada akhirnya eksistensi dan minat masyarakat terhadap koperasi akan mengalami kenaikan.

- 6) Perkembangan UMKM di Kota Pekalongan pasca pandemi ini sangat dinamis, namun disisi lain pemberian fasilitasi kepada UMKM dirasa masih kurang dan belum optimal. Pemberian fasilitasi seperti fasilitasi halal, merek, dan fasilitasi pemasaran yang menunjang keberlangsungan UMKM masih belum optimal dengan jumlah pemberian fasilitasi yang masih sangat terbatas. Perlu dilakukan peningkatan jumlah peserta pelatihan dan jumlah fasilitasi bagi UMKM, terutama sertifikasi yang dapat menunjang keberlangsungan suatu UMKM. Disisi lain, perlunya pemberian pendampingan dan fasilitasi bagi UMKM dalam proses pemasaran produknya baik melalui media *online* ataupun secara *offline* sehingga akan meningkatkan kinerja usaha dari UMKM. Dukungan lainnya yang perlu dilakukan untuk UMKM antara lain fasilitasi dan pendampingan dalam proses perizinan berusaha bagi UMKM sehingga secara aspek legalitas usaha UMKM akan terjamin.

# **BAB II**

## **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/*deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada  
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Misi Ke-7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government		
Tujuan Kota :		

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
Tujuan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,08 Indeks
Tujuan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatkan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,32 Persen
Tujuan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	3,69 Persen
Sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	85,60 Indeks
Sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	26,97 Juta USD
Sasaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Rp. 8,42 Triliyun
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota	Persentase ketersediaan laporan	100 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
Pekalongan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	capaian kinerja	
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,17 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	92 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 Persen
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar	79,99 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
Pekalongan : Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	dan perengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	
Program Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	63,64 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0,98 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	4,85 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Administrasi	Persentase ketercapaian administrasi	100 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
Kepegawaian Perangkat Daerah	kepegawaian perangkat daerah	
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	12,50 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	45,98 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	72,73 Persen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	25 Pelaku Usaha
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	79,99 Persen
Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 Persen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	225 Orang
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	186 Unit Usaha
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan	Jumlah Sarana dan	76 Unit

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19 Laporan
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	3 Laporan

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2024
dan Pestisida Bersubsidi	Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5.038 Unit
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	85 Orang
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	160 UMKM
Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	55 MKM

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan

jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Target Sasaran Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat Daerah
2	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	Nilai ekspor perdagangan	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3	Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari Koperasi	Rp Trilyun	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Target Sasaran Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,18	76,48	76,78	77,08	95,93	95,93
2	Meningkatkan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	1,88	2,28	2,83	3,32	4,55	4,55
3	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen	3,99	3,99	3,84	3,69	3,56	3,44
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	83,50	84,50	85,50	85,60	85,70	85,80
5	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,14	26,44	26,71	26,97	27,24	27,51
6	Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari Koperasi	Rp Trilyun	7,52	7,82	8,12	8,42	8,72	9,02

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024  
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

No	Sasaran Strategis	Indikator	2024	
			Satuan	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95,83
2	Meningkatkan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	3,32
3	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen	3,69
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,60
5	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,97
6	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp Trilyun	8,42

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.973.297.000,00	APBD-P
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 8.660.000,00	APBD-P
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 138.663.000,00	APBD-P
4.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 114.131.000,00	APBD-P
5.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 315.984.000,00	APBD-P

6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.012.673.000,00	APBD-P
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 7.107.730.000,00	APBD-P
8.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 110.667.000,00	APBD-P
9.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 606.707.000,00	APBD-P
10.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 952.998.000,00	APBD-P

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

#### **3.1. PENGUKURAN KINERJA**

***Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :***

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya  
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ **Akuntabilitas**

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ **Perencanaan**

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ **Pengelolaan**

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ **Penganggaran**

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ **Pengawasan Kerja**

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

### **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left( \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No.

54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

### 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,60	85,75	100,18	Sangat berhasil
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,97	14,50	53,77	Tidak berhasil
3	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp Trilyun	8,42	10,33	122,71	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 92,22% dengan kategori Berhasil.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	84,21	84,50	85,45	85,75	▲
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	30,26	18,15	11,09	14,50	▲

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
3	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Rp Trilyun	7,22	5,9	11,46	10,33	▼

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,75	85,80	99,94	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	14,50	27,52	52,69	Tidak Berhasil
3	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Rp Trilyun	10,33	9,02	114,52	Sangat Berhasil

### 3.2.1. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95,83	98,53	102,82	Sangat Berhasil

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2	Meningkatnya kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	3,32	6,60	198,80	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	Persen	3,69	-13,72	-371,85	Sangat Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar -70,23 % dengan kategori sangat tidak berhasil.

### 3.2.2. Analisis Capaian Kinerja

#### SASARAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	82,00	Indeks	84,50	85,45	85,60	85,75	100,18	85,80

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan memperoleh nilai 85,75 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Penilaian tersebut menunjukkan adanya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Selain itu, keberhasilan pada indikator ini juga dukung adanya sarana dan prasarana yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta proses perencanaan dan evaluasi secara periodik yang dilakukan oleh pimpinan di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Perbandingan Indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat Kota Pekalongan dan Provinsi pada tahun 2024 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Keterangan
1	Nilai SAKIP OPD	Indeks	85,75	A
2	Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah	Indeks	82,63	A
3	Nilai SAKIP Kota Pekalongan	Indeks	73,02	BB

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.40 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,1

2	Pengukuran Kinerja	30	25,5
3	Pelaporan Kinerja	15	12,90
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	21,25
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>85,75</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		A (Memuaskan)	

Tabel 3.17. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024	Predikat	Keterangan
1	BAPPEDA	88,50	A	Belum Tercapai
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,40	A	Belum Tercapai
3	Dinas Lingkungan Hidup	85,45	A	Belum Tercapai
<b>4</b>	<b>Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM</b>	<b>85,75</b>	<b>A</b>	<b>Tercapai</b>
5	Inspektorat Daerah	84,60	A	Tercapai
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,25	A	Belum Tercapai
7	BPKAD	84,50	A	Tercapai
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	82,75	A	Belum Tercapai
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	83,25	A	Tercapai
10	BKPSDM	83,20	A	Tercapai

**Faktor pendukung keberhasilan** capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja Nilai SAKIP OPD:

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.663.000	15.663.000	15.663.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.310.164.000	7.054.313.000	6.409.919.183
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.903.000	522.003.000	495.280.335
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	824.755.000	809.055.000	772.925.528
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	534.575.000	567.263.000	492.815.448
Total		9.195.060.000	8.973.297.000	8.191.603.494

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94,69 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,18 %, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,79%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Target untuk indikator ini adalah 100 % dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100 %. realisasi 100 % sehingga capaiannya 100 %. Indikator ini tercapai karena adanya dukungan dan

arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. Disamping itu juga sistem koordinasi dan komunikasi yang dibangun secara baik antar bidang yang ada, semakin mendukung dalam pencapaian target yang ada.

## Dokumentasi Kegiatan Sasaran 1



Perjanjian Kinerja Perubahan ASN di Lingkungan Dindagkop UKM Tahun 2024



LKj Triwulan ASN di Lingkungan Dindagkop UKM Tahun 2024



Kegiatan Apel Barang Milik Daerah di Lingkungan Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan



Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dindagkop dan UKM Tahun 2024

## SASARAN 2 : Meningkatkan Nilai Ekspor Perdagangan

Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Nilai Ekspor Perdagangan

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Ekspor Perdagangan	26,18	Juta USD	18,15	11,09	26,97	14,50	53,77	27,51

Capaian Indikator Nilai Ekspor Perdagangan adalah sebesar 14,50 Juta USD dari target sebesar 26,97 Juta USD yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 53,77% atau tidak mencapai target yang telah diperjanjikan. Penurunan nilai ekspor dikarenakan adanya penurunan harga komoditas unggulan potensial ekspor dan juga perlambatan ekonomi global yang memicu penurunan permintaan dari negara tujuan Ekspor seperti China, Amerika Serikat dan negara - negara di wilayah Eropa. Selain itu, penurunan ekspor juga dipengaruhi oleh adaptivitas eksportir terhadap regulasi ekspor - impor yang sangat dinamis, sehingga permasalahan penerapan regulasi baru ini sering dialami oleh para eksportir. Adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar juga menjadikan pengaruh dalam kinerja ekspor pada tahun 2024.

Perbandingan Indikator sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan dengan dengan Provinsi dan Nasional pada tahun 2024 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Keterangan
1	Niai Ekspor Perdagangan	Juta USD	14,50	Periode Januari sd Desember 2024
2	Nilai Ekspor Provinsi Jawa Tengah	Juta USD	985,09	Periode Januari sd Oktober 2024
3	Nilai Ekspor Nasional	Milliar USD	264,70	Periode Januari sd Desember 2024

4	Nilai Ekspor Kabupaten Pekalongan	Juta USD	14,29	Data pada LKJIP 2021
---	-----------------------------------	----------	-------	----------------------

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM telah melaksanakan beberapa upaya konkret untuk ekspor meningkatkan Ekspor produk unggulan Kota Pekalongan, antara lain :

a) Peningkatan Standar dan Mutu Produk Unggulan Ekspor

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya konkret untuk meningkatkan produk ekspor melalui peningkatan standar dan mutu produk seperti "*branding*" produk ekspor dan meningkatkan kemitraan usaha antar eksportir. Peningkatan standar dan mutu produk dilaksanakan dengan pelatihan ekspor berjenjang 3 (Tiga) tahap. Dalam pelatihan tersebut terdapat *coaching clinic* dan *choaching program* bagi eksportir terutama bagi eksportir pemula terkait regulasi, alur ekspor dan pangsa pasar ekspor. Diharapkan dengan pelaksanaan *choacing clinic* dan *coaching program* tersebut dapat menciptakan kerjasama dan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat bersama - sama meningkatkan pelaksanaan ekspor.

b) Perluasan Pasar Ekspor

Upaya perluasan ekspor produk unggulan Kota Pekalongan dilaksanakan melalui keikutsertaan Kota Pekalongam melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam pameran atau promosi produk unggulan dalam negeri. Keikutsertaan dalam promosi produk unggulan ini diharapkan menjadi salah satu jalan dalam meningkatkan nilai Ekspor Kota Pekalongan dengan mengenalkan produk unggulan di kancah nasional maupun internasional. Selain itu, dengan adanya keikutsertaan dalam promosi unggulan diharapkan dapat memotivasi UMKM untuk meningkatkan mutu produk dan strategi pemasaran yang baik dari UMKM lain yang juga mengikuti pameran atau promosi produk unggulan dalam negeri. Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota

Pekalongan mengikuti kegiatan Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) yang merupakan pameran ekspor terbesar di Indonesia, dalam pameran tersebut mempertemukan pelaku usaha/UMKM Indonesia dengan 5.000 *buyers* dari seluruh dunia.

c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan serta Perlindungan Konsumen

Upaya peningkatan Nilai Ekspor juga dilaksanakan melalui peningkatan sarana prasarana yang menunjang perdagangan seperti pembangunan dan pemeliharaan Pasar. Selain itu untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana di dukung dengan Sumber Daya Manusia pada Pasar yang berkompeten. Diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dapat meningkatkan nilai ekspor perdagangan. Selain sesuai amanat Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang di Kota Pekalongan masih perlu untuk digiatkan lagi. Sosialisasi mengenai perlindungan konsumen perlu dilaksanakan secara masif dan efektif lagi terutama kepada pedagang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor perdagangan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja Nilai Ekspor Perdagangan :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah	136.241.000	114.131.000	112.193.852

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	Kabupaten/Kota			
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.012.233.000	1.012.673.000	986.171.308
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.702.231.000	6.884.980.000	6.626.949.138
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	67.600.000	222.750.000	198.229.000
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	113.338.000	130.148.000	129.608.704
	Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kab/ Kota	8.515.000	8.515.000	6.988.900
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	315.984.000	315.984.000	308.385.385
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	8.400.000	6.200.000	5.867.500
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	8.400.000	2.460.000	2.460.000
Total		9.195.060.000	8.973.297.000	8.191.603.494

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 91,29 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 53,77 %, maka dapat dikatakan tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 (dua) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Ekspor. Target untuk indikator ini adalah 7,79 persen dan realisasi 7,50 persen sehingga capaiannya 96,25 persen. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam meningkatkan skala usahanya yang berorientasi kepada pasar ekspor. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir dengan target 25 pelaku usaha. realisasi 41 pelaku usaha sehingga capaiannya 164 persen. Indikator ini tercapai karena adanya dukungan dari segenap stakeholder dalam rangka pendampingan kepada para pelaku usaha untuk terus meningkatkan skala usaha dengan berorientasi pada ekspor. Dan juga adanya dukungan kepada para pelaku usaha berupa pemberian fasilitas pelatihan ekspor serta dukungan dalam peningkatan kompetensi termasuk fasilitasi dalam pengurusan dan pendampingan dalam perizinan berusaha.

- 2) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Target untuk indikator ini adalah 5,34 persen dan realisasi 2,05 persen sehingga capaiannya 38,38 persen. Indikator program ini belum dapat terealisasi karena kurangnya sarana dan dukungan dalam memberikan fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha UMKM. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kegiatan ini diukur dengan indikator peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya dengan target 100 persen, realisasi 146,23 persen sehingga capaiannya 146,23 persen. Indikator ini tercapai karena adanya dukungan dari segenap stakeholder dalam rangka pendampingan kepada para pelaku usaha khususnya UMKM untuk terus meningkatkan skala usaha dengan aktif dalam mengikuti beberapa pameran. Dan juga adanya dukungan kemajuan teknologi yang saat ini dirasa semakin pesat, maka dukungan fasilitasi pemasaran produk UMKM dapat dilakukan melalui media online berupa pemasaran melalui *marketplace* yang dimiliki

oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan berupa brayan market.

### Dokumentasi Kegiatan Sasaran 2



Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ekspor Tahun 2024 oleh Dindagkop UKM Kota Pekalongan dengan mengundang narasumber dari pihak yang berkompeten di bidangnya

Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Keikutsertaan Dekranasda Kota Pekalongan dalam Pameran Promosi Produk Unggulan



Pelaksanaan Standarisasi Konsumen melalui pelaksanaan Tera dan Tera Ulang



Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pemeliharaan Pasar

### SASARAN 3 : Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi

Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	7,52	Juta USD	5,9	11,46	8,42	10,33	122,71	9,02

Capaian Indikator Nilai Modal usaha UMKM dai Koperasi adalah sebesar Rp.10,33 Trilyun yang dari target sebesar Rp. 8,42 Trilyun yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 122,71% atau mencapai target yang telah diperjanjikan. Capaian tersebut menunjukkan adanya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Indikator sasaran Meningkatnya Nlai Modal Usaha UMKM dari Koperasi merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi. Capaian Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi ini mengalami kenaikan dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Meningkatnya geliat ekonomi sehingga meningkatkan permintaan dari UMKM ke

Koperasi.

Perkembangan ekonomi pasca pandemi di Kota Pekalongan yang semakin membaik salah satunya ditandai dengan meningkatnya aktivitas UMKM. Peningkatan aktivitas ini mendorong adanya pengembangan usaha yang diikuti oleh permintaan kenaikan modal dari UMKM ke Koperasi. Hal ini berdampak baik pada meningkatnya nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari Koperasi.

2. Penerapan laporan berbasis teknologi informasi pada aplikasi looksaja dan keberhasilan penerapan (SAK ETAP) oleh beberapa Koperasi.

Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan melaksanakan pelatihan Okupansi Bagi Pengurus Koperasi dan Sosialisasi Perkoperasian untuk Koperasi di Kota Pekalongan. Pelatihan ini diselenggarakan guna mendorong koperasi untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam mengelola Koperasi sesuai dengan kaidah regulasi yang ada.

3. Pelatihan perkoperasian yang meningkatkan kinerja internal koperasi

Selain Pelatihan Okupansi Bagi Pengurus Koperasi, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan juga melaksanakan Sosialisasi Perkoperasian. Beberapa koperasi tidak aktif di Kota Pekalongan secara umum memiliki permasalahan internal antar pengurus dengan anggota atau antar anggota, hal tersebut menjadi hambatan bagi koperasi untuk maju dan dapat menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Soalisasai Perkoperasian ini dilaksanakan guna mendorong koperasi untuk dapat meningkatkan manajemen internal dan SDM pengurus serta anggota koperasi sehingga permasalahan internal tersebut tidak terjadi di koperasi yang lain.

4. Manajemen *close loop* dan *open loop* pada Koperasi

Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang baru saja disahkan pada akhir tahun 2023 mulai dilaksanakan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pendirian, izin usaha simpanan pinjaman, standar

operasional manajemen, kegiatan usaha, skala usaha, pengurus, pengelola, pengawas dan dewan pengawas syariah, permodalan, peran pemerintah dan pemerintah daerah, prinsip mengenali pengguna jasa layanan simpan pinjam, pengawasan dan pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dengan adanya peraturan baru ini, Koperasi harus memilih penerapan sektor keuangan bersifat tertutup (*close loop*) atau terbuka (*open loop*).

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (REFOCUSING) (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	110.667.000	110.667.000	109.688.404
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	606.707.000	606.707.000	557.821.299
Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	952.998.000	952.998.000	925.898.400
Total		1.670.372.000	1.670.372.000	1.593.408.103

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,39 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 122,71 %, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 28,64%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Target untuk indikator ini adalah 31,49 persen dan realisasi 30,77 persen sehingga capaiannya 97,72 persen. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada koperasi yang berada di Wilayah Kota Pekalongan. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :  
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase usaha simpan pinjam oleh

koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota dengan target 63,64 persen, realisasi 111,61 persen sehingga capaiannya 175,37 persen. Indikator ini tercapai karena adanya dukungan dari segenap stakeholder dalam rangka proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi sehingga proses akuntabilitas kinerja koperasi dapat berjalan dengan baik.

- 2) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Target untuk indikator ini adalah 58,77 persen dan realisasi 88,32 persen sehingga capaiannya 150,28 persen. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya dukungan dari segenap stakeholder terkait dalam proses peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian sehingga beragam kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus, anggota maupun manajemen koperasi dapat berjalan dan berhasil dengan baik. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota dengan target 0,98 persen dan realisasi 0,12 persen sehingga capaiannya 12,41 persen. Indikator ini tidak tercapai karena kurangnya dukungan dan kesempatan dalam rangka fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi koperasi khususnya bagi anggota koperasi, pengurus dan jajaran manajemen koperasi. Banyaknya jumlah anggota koperasi, pengurus koperasi dan manajemen koperasi belum sepenuhnya dapat diberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan guna mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi.

- 3) Program Pengembangan UMKM. Target untuk indikator ini adalah 12,16 persen dan realisasi 25,56 persen sehingga capaiannya 210,22 persen. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya dukungan dari segenap stakeholder terkait dalam proses pengembangan UMKM sehingga beberapa pelaku usaha UMKM dapat menjadi wira usaha melalui peningkatan kompetensi, tata kelola manajerial keuangan yang semakin meningkat, legalitas perizinan berusaha yang lengkap. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan ini diukur dengan indikator meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha dengan target 4,85 persen dan realisasi 5,52 persen sehingga capaiannya 113,85 persen. Indikator ini tercapai karena dukungan dari beberapa *stake holder* dalam memberikan pendampingan bagi UMKM dalam rangka pengembangan usaha berupa pemberian fasilitas pameran, pelatihan keterampilan dan beberapa bantuan hibah sarana pemasaran pemasaran. Juga adanya dukungan dalam pemberian sertifikasi halal kepada para pelaku usaha UMKM khususnya yang bergerak dalam jasa rumah potong hewan.

### Dokumentasi Kegiatan Sasaran 3



Pelaksanaan Sosialisasi Okupasi Kompetensi bagi Koperasi



Kegiatan Sosialisasi Regulasi bagi Koperasi



Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Teknis Barista



Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Halal bagi UMKM



Penyerahan bantuan sarana pemasaran berupa gerobak kepada UMKM



Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.341.510.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 18.161.865.384,- atau sebesar 93,90%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 12.001.045.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.488.454.497,- . atau sebesar 95,73%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

## Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	(%)
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>1.670.372.000</b>	<b>1.593.408.103</b>	<b>95,39</b>
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>110.667.000</b>	<b>109.688.404</b>	<b>99,12</b>
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	110.667.000	109.688.404	99,12
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	110.667.000	109.688.404	99,12
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>606.707.000</b>	<b>557.821.299</b>	<b>91,94</b>
2.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	606.707.000	557.821.299	91,94
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	606.707.000	557.821.299	91,94
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>952.998.000</b>	<b>925.898.400</b>	<b>97,16</b>
3.	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	952.998.000	925.898.400	97,16

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	(%)
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil	952.998.000	925.898.400	97,16
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>17.671.138.000</b>	<b>16.568.457.281</b>	<b>93,76</b>
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>8.660.000</b>	<b>8.237.500</b>	<b>96,16</b>
4	Kegiatan: Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	6.200.000	5.867.500	94,64
	1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.200.000	5.867.500	94,64
6	Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Gudang	2.460.000	2.460.000	100
	1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	2.460.000	2.460.000	100
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>7.107.730.000</b>	<b>6.825.178.138</b>	<b>96,02</b>
7	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.884.980.000	6.626.949.138	96,25
	1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.797.905.000	6.568.682.138	96,63
	2. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	87.075.000	58.267.000	66,92

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	(%)
8	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	222.750.000	198.229.000	88,99
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	222.750.000	198.229.000	88,99
<b>E.</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>138.663.000</b>	<b>136.597.604</b>	<b>98,51</b>
9	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	130.148.000	129.608.704	99,59
	Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	130.148.000	129.608.704	99,59
10	Kegiatan: Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kab/ Kota	8.515.000	6.988.900	82,08
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	8.515.000	6.988.900	82,08
<b>F.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>114.131.000</b>	<b>112.193.852</b>	<b>98,30</b>
11	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	114.131.000	112.193.852	98,30
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	114.131.000	112.193.852	98,30
<b>G.</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>315.984.000</b>	<b>308.385.385</b>	<b>97,60</b>

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	(%)
12	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	315.984.000	308.385.385	97,60
	1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	281.874.000	276.175.385	97,98
	2. Sub Kegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	34.110.000	32.210.000	94,43
<b>H.</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>1.012.673.000</b>	<b>986.171.308</b>	<b>97,38</b>
13	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.012.673.000	986.171.308	97,38
	1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	902.033.000	878.974.604	97,44
	2. Sub Kegiatan: Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kab/ Kota	110.640.000	107.196.704	96,89
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.973.297.000</b>	<b>8.191.603.494</b>	<b>91,29</b>
14	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.663.000	15.663.000	100
	1. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.146.000	2.146.000	100
	2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.517.000	1.517.000	100
	3. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	(%)
15	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.054.313.000	6.409.919.183	90,87
	1. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.985.107.000	6.343.113.183	90,81
	2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.800.000	65.400.000	96,46
	3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.406.000	1.406.000	100,00
16	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100,00
17	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	522.003.000	495.280.335	94,88
	1. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000	5.448.000	99,05
	2. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.351.000	88.567.500	95,90
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	2.491.000	99,64
	4. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.850.000	85.408.000	99,49
	5. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.302.000	60.686.550	99,00
	6. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.500.000	2.500.000	100,00
	7. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.000.000	250.179.385	91,98

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	(%)
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	809.055.000	772.925.528	95,53
	1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	100,00
	2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.300.000	297.862.426	93,29
	3. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	487.355.000	472.663.102	96,99
19	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.263.000	492.815.448	86,88
	1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	496.163.000	422.815.948	85,22
	2. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	29.102.000	97,01
	3. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.100.000	40.897.500	99,51
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>19.341.510.000</b>	<b>18.161.865.384</b>	<b>93,90</b>

### 3.4. PRESTASI YANG DIRAIH

Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan melalui UPTD Metrologi Legal mendapatkan Anugerah Penghargaan Perlindungan Konsumen dari Kementerian Perdagangan RI berupa Penghargaan Pasar Tertib Ukur (PTU) untuk Pasar Podosugih, Pasar Kraton dan Pasar Patiunus. Dengan anugerah penghargaan ini membuktikan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan melalui UPTD Metrologi Legal terus berkomitmen penuh

dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pada khususnya dan pelaku usaha pada umumnya dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

Disamping itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan juga mendapatkan penghargaan untuk ASN Award tingkat Kota Pekalongan dalam kategori Jabatan Administrator Terbaik Putri tahun 2024.





### 3.5. INOVASI

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terus melakukan inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penerimaan retribusi daerah berupa retribusi pelayanan pasar dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berinovasi dalam memberikan pelayanan berupa:

1. Inovasi Sistem Informasi Pencatatan dan Penerimaan Retribusi Pasar (SiTantri). SiTantri merupakan sistem berbasis website yang dibangun guna mendukung digitalisasi laporan pencatatan dan penerimaan retribusi pasar. SiTanti digunakan oleh petugas juru pungut retribusi, admin pasar, koordinator, bendahara

penerimaan serta pimpinan untuk proses pencatatan retribusi. Berdasarkan SK Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Nomor 050/00015.2 Tahun 2023 tentang Keterlibatan Stakeholders Dalam Pelaksanaan Web Sitantri Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan serta SK Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Nomor 050/00018.5 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Aplikasi SiTantri Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

2. Inovasi layanan pengaduan secara online (Sapadaku) yang dirancang dengan berbasis website, sehingga memudahkan bagi masyarakat ataupun stakeholders dalam mengevaluasi pelayanan publik pada Dinas Perdagangan Kota Pekalongan. Aplikasi Sapadaku, dirancang untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan menghadirkan solusi praktis, modern, dan efisien. Selain itu aplikasi Sapadaku juga bertujuan untuk memberikan kemudahan menyampaikan pengaduan secara online, Pemrosesan laporan yang cepat dan transparan, dan dibangun untuk mendukung layanan yang lebih responsif.

Diharapkan dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan akan dapat memberikan pelayanan prima dan berkualitas kepada masyarakat dan stakeholders.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pada tahun 2024 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menetapkan 3 (Tiga) Capaian Kinerja Tujuan dan 3 (Tiga) Capaian Kinerja Sasaran. Rincian pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai realisasi 98,53 dari target yang ditetapkan sebesar 95,83. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar 102,82 % dengan kategori Sangat Tinggi;
2. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan indikator Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor mencapai realisasi 6,60 dari target yang ditetapkan sebesar 3,32. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar 198,80% dengan kategori sebesar Sangat Tinggi;
3. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi dengan indikator Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi mencapai realisasi -13,72% dari target yang di tetapkan sebesar 3,69%. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar -371,85% dengan kategori Sangat Rendah;
4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD mencapai realisasi 85,75 dari target yang ditetapkan sebesar 85,60. Prosentase capaian dari indikator tersebut sebesar 100,18% dengan kategori Sangat Tinggi;
5. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan dengan indikator Nilai Ekspor Perdagangan mencapai realisasi sebesar 14,50 Juta USD dari target

yang ditetapkan sebesar 26,97 USD. Prosentase capaian dari indikator tersebut sebesar 53,77% dengan kategori Rendah;

6. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi dengan indikator Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi mencapai realisasi sebesar 10,33 Trilyun Rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 8,42 Trilyun Rupiah. Prosentase capaian indikator tersebut sebesar 122,71% dengan kategori Sangat Tinggi.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terus berupaya untuk melakukan perbaikan kedepan terhadap beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk dapat memperbaiki capaian kinerja sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dindagkop UKM akan melakukan peningkatan volume ekspor melalui keikutsertaan dalam berbagai pameran produk unggulan dan pelaksanaan workshop konten promosi. Diharapkan di era serba digital ini, pelaksanaan workshop konten promosi dapat mendorong UMKM potensial ekspor untuk melakukan pemasaran secara online.
2. Pada Tahun 2025 akan diselenggarakan Pelatihan Digitalisasi Laporan Keuangan Koperasi pada awal Triwulan I Tahun 2025. Selain itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM melalui Bidang Koperasi dan UMKM berupaya meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi secara berkelanjutan dan intens.

Pekalongan, 26 Februari 2025

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM



**Drs. SUPRIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199201 1 010

## LAMPIRAN

### IKU PERUBAHAN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)**  
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	82,00	83,50	84,50	85,50	85,60	85,70	85,80	Inspektorat Daerah	Dindagkop UKM
2	Meningkatnya nilai ekspor perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	Nilai ekspor perdagangan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	25,92	26,18	26,44	26,71	26,97	27,24	27,51	Dindagkop UKM	Dindagkop UKM
3	Meningkatnya nilai modal usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari Koperasi	Rp. Trilyun	Nilai modal usaha UMKM bersumber dari koperasi	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	7,22	7,52	7,82	8,12	8,42	8,72	9,02	Dindagkop UKM	Dindagkop UKM

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan



Drs. SUPRIONO, MM

NIP. 19661008 199203 1 010

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.SUPRIONO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.

Jabatan : Wali Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 9 Desember 2024

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Pihak Pertama,

Kepala DINDAGKOP UKM



Drs. SUPRIONO, MM

NIP. 19661008 199203 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Unit Kerja: Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95.83 Indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.32 Persen	Formulasi : (Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N dikurangi Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N-1) dibagi Nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun N-1 dikali 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM
3.	Meningkatkan nilai modal usaha dari koperasi	Persentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi	3.69 Persen	Formulasi : (Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - 1 ) / Nilai modal usaha UMKM dari koperasi tahun N - 1 * 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Sasaran :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	85.80 Persen	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Nilai Ekspor Perdagangan	Nilai ekspor perdagangan	26.97 Juta USD	Formulasi : nilai ekspor pada tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM
3.	Meningkatnya Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	8.42 Rp. Trilyun	Formulasi : Nilai Modal Usaha UMKM dari Koperasi s.d Tahun N (akumulasi Tahun N-1 ditambah Tahun N) nilai ekspor pada tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DINDAGKOP UKM

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.973.297.000,00	APBD-P
2.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 8.660.000,00	APBD-P
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 138.683.000,00	APBD-P
4.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 114.131.000,00	APBD-P
5.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 315.984.000,00	APBD-P
6.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.012.673.000,00	APBD-P
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 7.107.730.000,00	APBD-P
8.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 110.667.000,00	APBD-P
9.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 606.707.000,00	APBD-P
10.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 952.998.000,00	APBD-P



H. ACHMAD AFZAN ARIFAN D.IUNAI, SE., MM.

Pekalongan, 9 Desember 2024



Drs. SUPRIONO, MM

NIP. 19661008 199203 1 010